

# LAPORAN KINERJA

## BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

## SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

# TAHUN 2020





## KATA PENGANTAR

**P**elaporan Kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kepegawaian dan Organisasi atas penggunaan anggaran yang telah dikelola. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Dengan segala dinamika yang ada, Biro Kepegawaian dan Organisasi beserta seluruh jajaran di dalamnya senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Pada tahun 2020, pencapaian kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi telah mencapai target yang telah diperjanjikan. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Laporan Kinerja ini.

Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai sistem pendukung DPR RI serta sebagai media evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa datang. Atas peran serta seluruh jajaran pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi yang berkomitmen dan berdedikasi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi serta jabatannya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Januari 2020  
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi,

Rahmad Budiaji, S.IP., M.Si  
NIP. 197008011996031001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
I.1. GAMBARAN UMUM	1
I.2. DASAR HUKUM	2
I.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	2
I.4. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI	5
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>9</b>
II.1. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019	9
II.2. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	10
<b>BAB AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>11</b>
<b>III</b>	
III.1. CAPAIAN KINERJA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI	11
III.2. EVALUASI CAPAIAN KINERJA	12
III.3. REALISASI ANGGARAN	57
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>63</b>
IV.1. KESIMPULAN	63
IV.2. REKOMENDASI	63
<b>LAMPIRAN</b>	<b>65</b>





## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	Tugas dan Fungsi Biro Kepegawaian dan Organisasi	3
<b>Gambar 2</b>	Struktur organisasi Biro kepegawaian dan Organisasi	5
<b>Gambar 3</b>	Data Jumlah Pegawai di Biro Kepegawaian dan Organisasi	6
<b>Gambar 4</b>	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Tingkat Pendidikan	7
<b>Gambar 5</b>	Visi, Misi dan Tujuan Biro Kepegawaian dan Organisasi	9
<b>Gambar 6</b>	Indikator Kinerja untuk Sasaran “Meningkatnya kualitas dukungan kepegawaian dan organisasi”	12
<b>Gambar 7</b>	Sosialisasi Jabatan fungsional perisalah legislatif dan Jabatan fungsional asisten perisalah legislatif	20
<b>Gambar 8</b>	Persiapan Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI Periode 2014 - 2019	36
<b>Gambar 9</b>	Data Persandingan Jumlah Pensiun Anggota DPR RI dan Pensiun Janda/Duda	38
<b>Gambar 10</b>	Pelaksanaan FGD Fraksi-Fraksi DPR RI	40
<b>Gambar 11</b>	Persandingan Target dan realisasi penyusunan SOP	43
<b>Gambar 12</b>	Pelatihan kesehatan yang dilaksanakan Bagian Pelayanan Kesehatan	53
<b>Gambar 13</b>	Penilaian ISO 9001 – 2015 Bagian Yankes tanggal 6 November 2019	54





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Penetapan kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi Tahun 2019	10
<b>Tabel 2</b>	Pengukuran Capaian Kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi Tahun 2019	11
<b>Tabel 3</b>	Jumlah PPNPN Tahun 2019 Di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI	18
<b>Tabel 4</b>	Tantangan Dan Rekomendasi Untuk Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi Oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana	47
<b>Tabel 5</b>	Perbandingan Data Kunjungan Pasien Poli Dokter Spesialis	49
<b>Tabel 6</b>	Perbandingan Data Kunjungan Pasien	50
<b>Tabel 7</b>	Akuntabilitas Keuangan Biro Kepegawaian dan Organisasi berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2019	57
<b>Tabel 8</b>	Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1 – Administrasi Kepegawaian	59





# EXECUTIVE SUMMARY

LAPORAN KINERJA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.....



# I

## PENDAHULUAN

### I.1. GAMBARAN UMUM

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) mengemban tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Setjen DPR RI menyelenggarakan sistem dukungan administrasi, persidangan, serta keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Biro Kepegawaian dan Organisasi (BKO) dibentuk untuk mengemban sebagian tugas dari Setjen DPR RI khususnya pada bagian sistem dukungan Administrasi kepada DPR RI. Sebagai bagian dari sistem dukungan administrasi kepada Dewan, BKO mempunyai bidang tugas pengelolaan manajemen kepegawaian, pelaksanaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi, penataan organisasi dan tata laksana, serta pelayanan kesehatan, dan terus berupaya melaksanakan tata kelola yang berkualitas, profesional, dan akuntebel sesuai dengan mekanisme berdasarkan prinsip *good governance* yang hasilnya dituangkan di dalam pelaporan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BKO mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokoknya atas penggunaan anggaran, serta di dalam penyusunan LKj harus didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan masing-masing instansi dalam hal ini Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7/PER-SEKJEN/2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Setjen dan BK DPR RI.

LKj Biro Kepegawaian dan Organisasi Tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020, sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja tahun mendatang, serta sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

### I.2. DASAR HUKUM

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen Nomor 7 Tahun 2018 (*selanjutnya disebut Persekjen tentang Organisasi dan Tata Kerja*)

menyebutkan bahwa sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri atas Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dalam Persekjen ini dijabarkan susunan organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta kedudukan, tugas dan fungsi dari Biro Kepegawaian dan Organisasi.

### I.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang teknis administrasi dan persidangan. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dibantu oleh Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Persidangan, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Badan Keahlian DPR RI dan didukung oleh Inspektorat Utama sebagai unit Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal DPR RI.


Biro Kepegawaian dan Organisasi merupakan salah satu Biro di lingkungan Deputi Bidang Administrasi. Tugas dan fungsi Biro kepegawaian dan Organisasi sebagaimana terdapat dalam Gambar 1.

**Gambar 1. Tugas dan Fungsi Biro Kepegawaian dan Organisasi**



Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2020





Fungsi tersebut didukung oleh 4 (empat) unit kerja setingkat eselon III, yaitu Bagian Kepegawaian, Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, dan Bagian Pelayanan Kesehatan.

**1. Bagian Kepegawaian**

Mempunyai tugas melaksanakan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Formasi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan formasi dan pengelolaan mutasi pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI;
- b. Subbagian Manajemen Kinerja Pegawai (MKP) mempunyai tugas melakukan kegiatan manajemen kinerja dan pengembangan karir pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI; dan
- c. Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

**2. Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi**

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pengelolaan administrasi kesekretariatan fraksi. Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Keanggotaan mempunyai tugas melakukan dukungan administrasi keanggotaan DPR RI dan pelaksanaan tata usaha Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi; dan
- b. Subbagian Kesekretariatan Fraksi mempunyai tugas melakukan dukungan administrasi kesekretariatan Fraksi DPR RI.

**3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana**

Mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi mempunyai tugas menelaah dan mengevaluasi kelembagaan dan jabatan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, dan
- b. Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di lingkungan Setjen dan BK DPR RI serta pelaksanaan kegiatan tata usaha Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

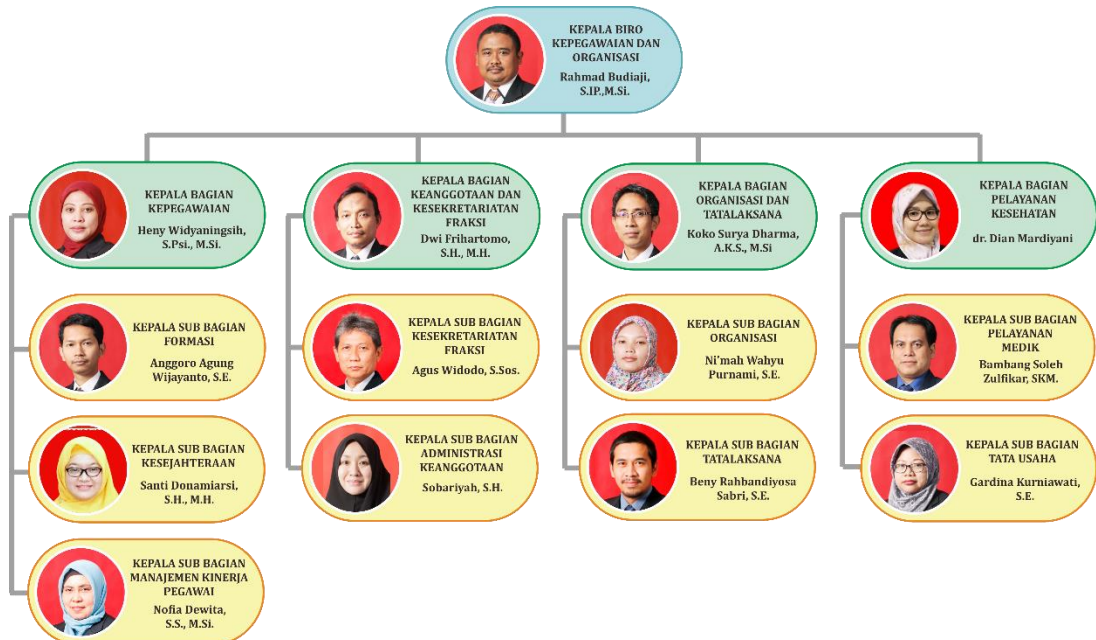
**4. Bagian Pelayanan Kesehatan**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kesehatan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Setjen dan BK DPR RI. Bagian Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan di lingkungan DPR RI, Setjen dan BK DPR RI;
- b. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha Bagian Pelayanan Kesehatan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Biro kepegawaian dan Organisasi tergambar dalam Gambar 2.

**Gambar 2.**  
**Struktur Organisasi Biro Kepegawaian dan Organisasi**




Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2020

#### I.4. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Permasalahan strategis yang dihadapi Biro Kepegawaian dan Organisasi berkaitan erat dengan dinamika internal dan eksternal yang terdiri atas:

1. Adanya pemotongan/pengurangan anggaran untuk program/kegiatan di Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana kebijakan pemerintah untuk melakukan realokasi dan *refocussing* anggaran untuk program/kegiatan penanganan pandemi Covid-19.
2. Penundaan pelaksanaan proses pengadaan CPNS Tahun 2019 dan peniadaan pengadaan CPNS Tahun 2020. Pelaksanaan proses rekrutmen CPNS Tahun 2019 yang sedianya diselesaikan pada awal Tahun 2020, mengalami penundaan yang cukup signifikan. Lanjutan proses pengadaan CPNS Tahun 2019 dilaksanakan mulai pada bulan Februari 2020 dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dilanjutkan dengan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada bulan September dan Oktober, serta pemberkasan dan penetapan NIP pada bulan November. Berakhirnya proses pengadaan CPNS Tahun 2019 pada Bulan November 2020 berakibat pada dibatalkannya proses pengadaan CPNS Tahun 2020. Hal ini mengakibatkan semakin lebarnya ketimpangan kebutuhan pegawai terhadap jumlah pegawai yang tersedia.
3. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan pengelolaan administrasi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pengelolaan



administrasi kesekretariatan fraksi belum dikelola secara efektif, sehingga layanan yang diberikan masih dianggap belum optimal.

4. Penataan struktur organisasi yang dilakukan pada tahun 2020 mengalami tantangan secara khusus pada tahapan penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Salah satu tantangan yang dialami yakni adanya kebijakan nasional penyederhanaan birokrasi yang tidak bisa serta merta disesuaikan dengan penataan struktur yang sedang dilakukan. Hal ini dikarenakan Setjen DPR RI sebagai Sekretariat Lembaga Negara memiliki karakteristik yang berbeda dengan instansi pemerintah lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatib yang menyatakan bahwa Setjen DPR RI sebagai sistem pendukung dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5. Dengan adanya Pandemi global Covid - 19 diperlukan sumber daya ekstra dalam melaksanakan skrining rutin kepada seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPR RI dan melakukan *Tracing* apabila ada pegawai di lingkungan Unit tersebut yang positif Covid-19.

Adapun langkah strategis yang ditempuh Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam menghadapi permasalahan strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penghematan dan/atau penyesuaian anggaran terhadap biaya belanja perjalanan dinas, honorarium dan biaya paket meeting. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran atas program/kegiatan yang dianggap strategis dan mendesak, Biro Kepegawaian dan Organisasi mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
2. Ketimpangan kebutuhan pegawai terhadap jumlah pegawai yang tersedia akibat dibatalkannya pengadaan CPNS Tahun 2020 disiasati dengan pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Kementerian Keuangan terkait penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN diluar kementerian keuangan yang telah lulus SKD bulan November 2020. Berdasarkan hasil MOU tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI mendapat tambahan 29 CPNS yang berasal dari PKN STAN yang prosesnya diselesaikan pada Bulan Desember 2020.
3. Untuk mempermudah akses informasi data perkembangan proses pengurusan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI, telah dibuat fitur baru dalam aplikasi SIGOTA yang dinamakan Sistem Informasi Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (SIMPAAW) yang berisi tentang informasi data seluruh proses administrasi Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW).



4. Dalam upaya untuk mencapai struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, dilaksanakan penataan struktur organisasi dengan melibatkan stakeholder dan pihak eksternal instansi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat khususnya Komisi II DPR RI, serta dengan pihak internal instansi yaitu unit kerja di luar Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Hasil penataan struktur organisasi yang telah dikaji dan disusun dikirimkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan pembahasan dan penetapan.
5. Untuk menghadapi permasalahan Pandemi global Covid - 19, telah dilaksanakan kerjasama dengan pihak penyedia jasa/ laboratorium. Selain itu untuk meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan yang diberikan, juga telah dilaksanakan akreditasi bagi layanan kesehatan untuk meningkatkan realibilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian dan konsistensi pelaksanaan pekerjaan.



## II

## PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### II.1. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI TAHUN 2020 – 2024

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2020 – 2024, untuk mendukung visi DPR RI, maka Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI memiliki visi, misi dan tujuan sebagai berikut:



Gambar 3. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI

### II.2. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro Kepegawaian dan Organisasi telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2020. Perjanjian kinerja berisi sasaran Program/ Kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir tahun. Penetapan Kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi tahun 2020 sebagaimana pada Gambar 4.



**Gambar 4. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI**

Untuk mendukung pencapaian sasaran program/ kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2020, telah dialokasikan dana untuk kegiatan Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan pagu anggaran sebesar Rp32.036.161.000,00 yang dilaksanakan oleh 4 (empat) unit kerja di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi.

### III AKUNTABILITAS KINERJA

#### III.1. CAPAIAN KINERJA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran Program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi Tahun 2020 sebagaimana pada Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi Tahun 2020**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>Meningkatnya kualitas dukungan kepegawaian dan organisasi</b>	1. Hasil penerapan merit sistem dalam manajemen ASN	Kategori 3	Kategori 3 *	100 %
		2. Indeks kepuasan dukungan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi	3,30		
		3. Hasil penilaian evaluasi kelembagaan	4	4	100 %
		4. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kesehatan	3,30	3,374	102,24 %
		5. Presentase penyerapan anggaran Biro Kepegawaian dan Organisasi	90 %	96.88 %	107,64 %

Ket: \* = Penilaian Mandiri tanpa Klarifikasi KASN

#### III.2. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Evaluasi capaian kinerja program/ sasaran dan indikator kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi tahun 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**SASARAN**

**Meningkatnya kualitas dukungan kepegawaian dan organisasi**

**1**

## Hasil Penerapan Merit Sistem dalam Manajemen ASN

Target

**3**

Realisasi

**3**

Capaian

**100 %**

Indikator kinerja ke 1 dari sasaran “Meningkatnya kualitas dukungan kepegawaian dan organisasi” adalah **“Hasil Penerapan merit sistem dalam manajemen ASN”**. Penghitungan kinerja Berdasarkan sistem merit dituangkan dalam Peraturan Ketua KASN nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut selanjutnya diturunkan melalui Peraturan Ketua KASN nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam peraturan dimaksud, penilaian mandiri dilakukan terhadap 8 (delapan) aspek manajemen, yaitu:

1. Perencanaan Kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan Karier;
4. Promosi dan Mutasi;
5. Manajemen Kinerja;
6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin;
7. Perlindungan dan Pelayanan; dan
8. Sistem Informasi.

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian mandiri sistem merit di lingkungan instansi Pemerintah, KASN menggunakan aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) yang mulai disosialisasikan pada akhir tahun 2019. Namun, karena terkendala pandemic Covid 19, sosialisasi atas implementasi penggunaan aplikasi tersebut menjadi terhambat. Alhasil, Sekretariat Jenderal DPR RI belum dapat melaksanakan penilaian mandiri menggunakan aplikasi SIPINTER, dan penilaian mandiri dilaksanakan tanpa verifikasi KASN.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri atas penerapan sistem merit di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan lembar kerja evaluasi atas 8 aspek dan 37 sub aspek, penerapan sistem merit di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI masuk dalam kategori baik. Pada tahun mendatang, penilaian mandiri akan menggunakan aplikasi SIPINTER KASN, langkah-langkah untuk menuju ke arah tersebut telah dilakukan dengan menjadwalkan pertemuan dengan KASN terkait sosialisasi penilaian mandiri sistem merit instansi menggunakan aplikasi SIPINTER. Melalui langkah tersebut, diharapkan hasil penilaian mandiri dapat menjadi lebih valid, dan menjadi masukan perbaikan pelaksanaan sistem merit di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam mendukung pencapaian target tersebut, Bagian Kepegawaian telah melaksanakan 7 aktivitas yang menghasilkan output sebanyak 1 kegiatan, 15 dokumen, dan 1 laporan, dimana kegiatan tersebut diturunkan kedalam 3 subbagian yang terdiri atas: Subbagian Formasi, Subbagian Manajemen Kinerja Pegawai (MKP),



dan Subbagian Kesejahteraan. Perjanjian Kinerja masing-masing subbagian adalah sebagai berikut:

#### SUBBAGIAN FORMASI

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya manajemen sumber daya manusia dalam bidang Formasi	1. Jumlah dokumen kegiatan formasi	4 Dokumen

#### SUBBAGIAN MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya manajemen sumber daya manusia	1. Jumlah dokumen manajemen kinerja 2. Assesment pegawai 3. Rencana laporan kegiatan Bagian Kepegawaian	4 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen

#### SUBBAGIAN KESEJAHTERAAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya manajemen sumber daya manusia	1. Jumlah dokumen kesejahteraan pegawai 2. Rencana dan laporan keuangan Bagian Kepegawaian	4 Dokumen 2 Dokumen

#### PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja menggambarkan pencapaian atas sasaran program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Rincian pengukuran capaian kinerja Bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020 yang terbagi dalam 3 subbagian adalah sebagai berikut:



## CAPAIAN KINERJA BAGIAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2020



Milestone  
Lanjutan Proses Pengadaan  
CPNS Tahun 2019



Capaian Kinerja Subbagian  
Formasi



Capaian Kinerja Subbagian  
Manajemen Kinerja Pegawai



Capaian Kinerja Subbagian  
Kesejahteraan





# MILESTONE: LANJUTAN PROSES PENGADAAN CPNS TAHUN 2019

**PENGADAAN CPNS  
SEBANYAK 50  
PEGAWAI**



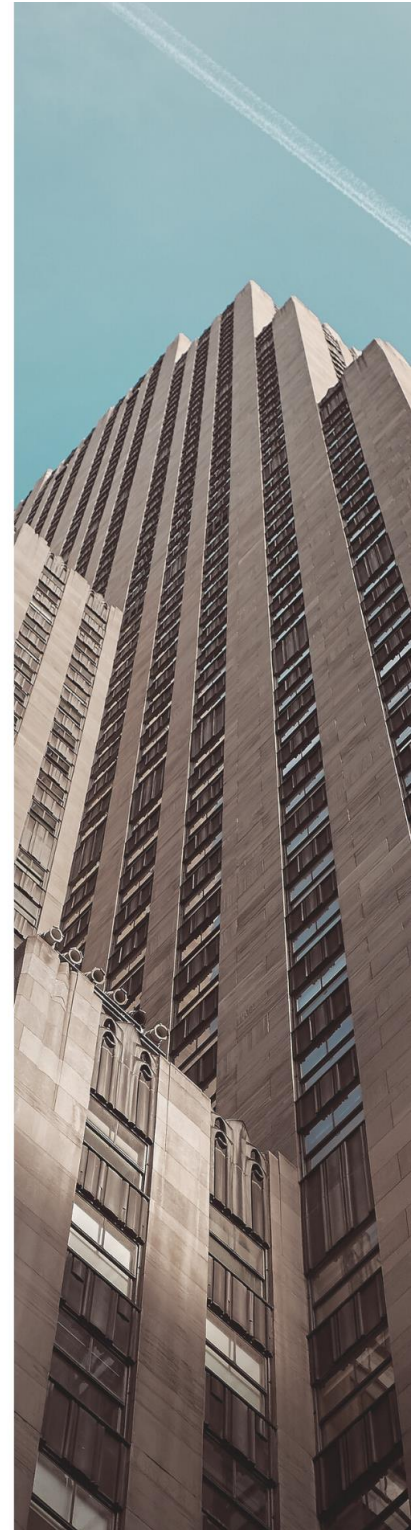


## 1. Sub Bagian Formasi

### Capaian Kinerja Subbagian Formasi

*Jumlah Dokumen Kegiatan Formasi  
(4 Dokumen)*

- 01** Terlaksananya perencanaan kebutuhan pegawai
  - Bezetting
  - Penyusunan Data Kebutuhan PNS Untuk Pengadaan CPNS
  - Inventarisir Peta Jabatan
  - Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
- 02** Terlaksananya pengadaan pegawai
  - Proses Pengadaan CPNS Tahun 2019
- 03** Terlaksananya Promosi Pegawai
  - Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
  - Kenaikan Pangkat
  - Pelantikan
  - Pengusulan CPNS TA. 2018 menjadi PNS
- 04** Terlaksananya Mutasi Pegawai
  - Mutasi Pejabat Pengawas dan Administrator
  - Mutasi Pejabat Pelaksana
  - Inpassing Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
  - Pegawai Pindah Instansi
  - Penyusunan Surat Keterangan







Jumlah dokumen kegiatan Formasi (4 Dokumen), yaitu:

Kegiatan		Keterangan		
A	Terlaksananya perencanaan kebutuhan pegawai			
	1	Bezetting	Pengisian bezzeting pada e-Formasi pada Bulan Maret	
	2	Penyusunan Data Kebutuhan PNS Untuk Pengadaan CPNS	Dilaksanakan pada Bulan Juni	
	3	Inventarisir Peta Jabatan	Dilaksanakan setiap bulan	
	4	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Dilaksanakan pada Bulan Oktober dengan jumlah peserta 34 orang	
B	Terlaksananya pengadaan pegawai			
	1	Proses Pengadaan CPNS Tahun 2019	a	Lanjutan proses pengadaan CPNS Tahun 2019, SKD pada bulan Februari
			b	Rapat Koordinasi dengan Kemenpan pada Bulan Juni
			c	Pelaksanaan SKB CAT dan e-Psikotest pada Bulan September
			d	Pelaksanaan SKB Wawancara pada Bulan Oktober
			e	Pelaksanaan Pemberkasan dan Penetapan NIP pada Bulan November
			f	Verifikasi dan Validasi Berkas Usulan CPNS
			g	Pengumpulan Berkas Kekurangan berkas CPNS
			h	Pembuatan Surat Pernyataan Rencana Penempatan untuk setiap usulan CPNS pada Bulan Desember
			i	Pengentrian Data Pegawai CPNS pada Aplikasi SIAP
	2	Proses Pengadaan CPNS PKN STAN	a	Penandatanganan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Kementerian Keuangan terkait penempatan lulusan PKN STAN diluar kementerian keuangan yang telah lulus SKD pada Bulan November
			b	Pelaporan kepada MenPAN dan RB terkait pengisian usulan formasi CPNS dari PKN STAN pada Bulan Desember
			c	Tindak lanjut serah terima berkas CPNS dan MoU antara Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kemenkeu



Kegiatan		Keterangan	
C	Terlaksananya Promosi Pegawai		
1	Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	a	Rapat Pansel Seleksi JPT lanjutan dari tahun 2019 sebanyak 3 kali pada Bulan Januari tentang pelaksanaan seleksi administrasi Pengisian JPT Madya (Kepala Badan Keahlian) dan JPT Pratama (Kepala Biro Persidangan I dan Inspektur II) serta Rencana Seleksi Uji Kompetensi dan seleksi wawancara akhir Kepala Badan Keahlian
		b	Penyampaian laporan pelaksanaan Seleksi JPT kepada Pimpinan DPR RI dan Penyampaian laporan pelaksanaan Seleksi JPT dan Permohonan Rekomendasi kepada Pimpinan KASN pada Bulan Mei
		c	Pengusulan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kepala Badan Keahlian kepada Presiden Republik Indonesia
		d	Penyusunan rencana seleksi JPT Madya dan Pratama pada Bulan Juli
		e	Laporan kembali Rencana Pelaksanaan Pengisian JPT di Lingkungan Setjen DPR RI tentang hasil seleksi Kepala Badan Keahlian dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang lowong kepada KASN pada Bulan Agustus
		f	Pelaksanaan persiapan Seleksi JPT pada bulan Agustus
		g	Pelaksanaan Asesmen JPT pada Bulan September
		h	Rapat Pansel terkait hasil Asesmen pada Bulan September
		i	Permohonan kesediaan menjadi anggota Pansel kepada Kepala Badan Keahlian dan Sekjen BPK pada Bulan November
		j	Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT tentang Mutasi Inspektur I menjadi Kapusdiklat, nama Anggota Pansel baru dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang lowong kepada KASN pada Bulan November
2	Kenaikan Pangkat	a	Bimtek Kenaikan Pangkat April dilaksanakan pada Bulan Februari 2020
		b	Kenaikan Pangkat dilaksanakan pada Bulan April dan Oktober



Kegiatan		Keterangan
		c Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kenaikan Pangkat Oktober pada Bulan Juli
		d Bimtek Kenaikan Pangkat Oktober pada Bulan Agustus
		e Penyerahan simbolis SK Kenaikan Pangkat Oktober pada bulan Desember
3	Pelantikan	a Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas) pada Bulan Januari, Juli, September, dan Oktober
		b Pelantikan CPNS TA 2018 menjadi PNS pada Bulan Mei
		c Pelantikan Pejabat Fungsional Peneliti, Analis APBN, Pamong Budaya, Perisalah Legislatif, Asisten Perisalah Legislatif, dan Widyaiswara pada Bulan September
		d Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kepala Badan Keahlian dan Pejabat Fungsional Pranata Komputer, Pranata Humas, dan Penerjemah pada Bulan Oktober
4	Pengusulan CPNS TA. 2018 menjadi PNS	Bulan April pengurusan SK CPNS TA 2018 menjadi PNS
D	Terlaksananya Mutasi Pegawai	
1	Mutasi Pejabat Pengawas dan Administrator	Dilaksanakan Rapat Tim Penilai Kinerja 10 kali pada Bulan Januari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember.
2	Mutasi Pejabat Pelaksana	Mutasi Pegawai Pelaksana pada Bulan Februari, April, Juni, November, dan Desember
3	Inpassing Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif	a Seleksi administrasi dilaksanakan pada 9 Juli 2020 sampai dengan 22 Agustus 2020
		b Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dilaksanakan 24 Agustus 2020
		c Pelaksanaan Uji Kompetensi Kompetensi Pengangkatan PNS menjadi Pejabat Fungsional Perisalah Legislatif melalui Inpassing/Penyesuaian menggunakan metode wawancara
4	Pegawai Pindah Instansi	a Asesmen pegawai pindah instansi dilaksanakan pada Bulan April, Juli, dan Oktober
		b Rapat Koordinasi dengan BKN terkait Pegawai Pindah Instansi pada Bulan Juni
5	Penyusunan Surat Keterangan	Penyusunan Surat Penunjukkan PLT sebanyak 18 Surat selama Bulan Februari s.d. Desember

## 2. Sub Bagian Manajemen Kinerja Pegawai (MKP)

### CAPAIAN KINERJA SUBBAGIAN MKP

#### A. Jumlah Dokumen Manajemen Kinerja (4 Dokumen)

##### TERLAKSANANYA PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI 1

- Pedoman Pola Karier
- Sosialisasi

##### TERLAKSANANYA MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI 2

- SKP
- PPKP
- Piloting Implementasi PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS
- e-Lapkin

##### TERLAKSANANYA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI 3

- Disiplin
- Pembentukan Tim
- Permohonan Ijin Perkawinan dan Perceraian
- Terlaksananya Sistem Informasi Pegawai

##### TERLAKSANANYA SISTEM INFORMASI PEGAWAI 4

- Integrasi data dengan BKN
- KTLN
- Digitalisasi
- Aplikasi SIAP

#### B. Asesment pegawai (1 kegiatan)

##### TERLAKSANANYA ASESMENT DALAM RANGKA IMPLEMENTASI MANAJEMEN TALENTA

- Asesment Pejabat Fungsional
- Asesment Pejabat Pelaksana
- Asesment Pejabat Pengawas
- Asesment Pejabat Administrator
- Job Fitting Pejabat Pimpinan Tinggi

#### C. Rencana laporan kegiatan Bagian Kepegawaian (1 dokumen)



a. Jumlah Dokumen Manajemen Kinerja (4 Dokumen)

Kegiatan		Keterangan	
A	Terlaksananya Pengembangan Karir Pegawai		
1	Pedoman Pola Karier	Penyusunan Pedoman Pola Karier pada Bulan Februari	
2	Sosialisasi	Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti, Analis APBN, Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif pada Bulan September	
B	Terlaksananya Manajemen Kinerja Pegawai		
1	SKP	a	Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh Pegawai pada Bulan Februari
		b	Sosialisasi Jabatan dan pengisian SKP bagi Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana (mutasi) pada Bulan Desember
2	PPKP		
3	Piloting Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS	a	Rapat Koordinasi pada Bulan Mei s.d. Desember
		b	Kunjungan Tim Piloting PP 30/2019 dari BKN Pusat pada Bulan Oktober
		c	Benchmarking BKPSDM Bogor Jawa Barat terkait integrasi, aplikasi e-Kinerja, dan dasar perhitungan pembayaran tunjangan kinerja pada Bulan November
		d	Bimbingan Teknis penerapan PP 30/2019 dalam rangka penyusunan konsep Manajemen Talenta pada Bulan Desember
		e	Laporan Piloting PP 30/2019 Setjen DPR RI pada FGD Evaluasi Hasil Pembinaan Manajemen Kinerja yang diadakan secara Nasional oleh BKN pada tanggal 25 – 26 November 2020 di Bali
4	e-Lapkin	Konsinyering terkait Pelaporan Kinerja PNS secara elektronik (e-Lapkin) pada Bulan November	
C	Terlaksananya Penegakan Disiplin Pegawai		
1	Disiplin	a	Proses pelanggaran disiplin sebanyak 15 pelanggaran
		b	Pemberian sanksi disiplin sebanyak 14 pelanggaran



		c	Pelanggaran disiplin yang belum diproses sebanyak 1 pegawai
		d	Penjatuhan pelanggaran disiplin ringan kepada 13 pegawai
		e	Penjatuhan pelanggaran disiplin sedang kepada 1 pegawai
		f	Penjatuhan pelanggaran disiplin berat kepada 1 pegawai
2	Pembentukan Tim	a	Pembentukan Tim Izin Perkawinan dan Perceraian pada Bulan Januari
		b	Tim Disiplin PNS pada Bulan Oktober
3	Permohonan Ijin Perkawinan dan Perceraian	a	Permohonan Izin Perkawinan sebanyak 21 pegawai
		b	Permohonan Izin Perceraian sebagai Penggugat sebanyak 17 pegawai
		c	Permohonan Izin Perceraian sebagai Tergugat sebanyak 4 pegawai
		d	Pemberian Izin Perceraian sebanyak 13 pegawai
		e	Penolakan Izin Perceraian sebanyak 1 pegawai
		f	Perceraian bersatu kembali sebanyak 1 pegawai
		g	Perceraian sedang dalam proses pemeriksaan sebanyak 3 pegawai
		h	Perceraian belum di proses sebanyak 2 pegawai
D	Terlaksananya Sistem Informasi Pegawai		
	a	Integrasi data dengan BKN	Konsinyering terkait integrasi data Sistem Informasi Pegawai dengan BKN
	b	KTLN	Pengurusan KTLN
	c	Digitalisasi	Digitalisasi data kepegawaian pada Bulan September
	d	Aplikasi SIAP	Konsinyering terkait pembenahan aplikasi SIAP

b. Asesment pegawai (1 kegiatan)

Kegiatan		Keterangan
Terlaksananya Asesment dalam rangka implementasi Manajemen Talenta		
1	Assesment Pejabat Fungsional	Assesment Pejabat Fungsional Analisis APBN, Perisalah Legislatif, dan Asisten Perisalah Legislatif pada Bulan November s.d. Desember



	Kegiatan	Keterangan
2	Assesment Pejabat Pelaksana	Assesment Pejabat Pelaksana pada Bulan September s.d. Desember
3	Assesment Pejabat Pengawas	Assesment seluruh Pejabat Pengawas pada Bulan November
4	Assesment Pejabat Administrator	Assesment seluruh Pejabat Administrator pada Bulan November
5	<i>Job Fitting</i> Pejabat Pimpinan Tinggi	<i>Job Fitting</i> Pejabat Pimpinan Tinggi sebanyak 17 Pejabat pada Bulan September

- c. Rencana laporan kegiatan Bagian Kepegawaian (1 dokumen)

Merupakan laporan kegiatan Bagian Kepegawaian selama 1 tahun.

### 3. Sub Bagian Kesejahteraan

## CAPAIAN KINERJA SUBBAGIAN KESEJAHTERAAN

### A. JUMLAH DOKUMEN KESEJAHTERAAN PEGAWAI (4 DOKUMEN)

#### ① TERLAKSANYA PENGGAJIAN PEGAWAI

- Penggajian PNS
- Penggajian PPNPN
- Rekap Daftar Hadir Pegawai

#### ② TERLAKSANYA PENGHARGAAN PEGAWAI

- Pemberian Penghargaan Satya Lencana

#### ③ TERLAKSANYA PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PEGAWAI

- Kenaikan Gaji Berkala
- Kartu Istri/Suami
- Mutasi Keluarga
- Cuti
- Kartu ucapan dan voucher ulang tahun
- SK Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya pencegahan COVID-19
- Surat Edaran tentang Tata Kerja dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru

#### ④ TERLAKSANYA PELAYANAN PENSIUN

- Pensiun

### B. RENCANA DAN LAPORAN KEUANGAN BAGIAN KEPEGAWAIAN (2 DOKUMEN)

#### ① ACTION PLAN DAN CASH PLAN

#### ② LAPORAN REALISASI TRIWULANAN



a. Jumlah dokumen kesejahteraan pegawai (4 Dokumen)

Kegiatan		Keterangan
A	Terlaksananya Penggajian Pegawai	
1	Penggajian PNS	Dilaksanakan setiap bulan
2	Penggajian PPNPN	Dilaksanakan setiap bulan
3	Rekap Daftar Hadir Pegawai	Dilaksanakan setiap bulan
B	Terlaksananya Penghargaan Pegawai	
1	Pemberian Penghargaan Satya Lencana	Dilaksanakan pada Bulan Oktober 2020, dengan rincian:
a	Satya Lencana 30 Tahun kepada 54 pegawai	
b	Satya Lencana 20 Tahun kepada 40 pegawai	
c	Satya Lencana 10 Tahun kepada 112 pegawai	
C	Terlaksananya Perlindungan dan Pelayanan Pegawai	
1	Kenaikan Gaji Berkala	Dilaksanakan setiap bulan, diberikan kepada 971 pegawai
2	Kartu Istri/Suami	Proses kartu istri sebanyak 6 kartu Proses kartu suami sebanyak 11 kartu
3	Mutasi Keluarga	Dilaksanakan setiap bulan, dengan rincian:
a	Kelahiran sebanyak 29	
b	Perkawinan sebanyak 23	
c	Perceraian sebanyak 7	
4	Cuti	Dilaksanakan setiap bulan, dengan rincian:
a	Cuti tahunan sebanyak 2.089	
b	Cuti alasan penting sebanyak 275	
c	Cuti sakit sebanyak 145	
d	Cuti bersalin sebanyak 14	
e	Cuti besar sebanyak 6	
f	Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) sebanyak 6	
5	Kartu ucapan dan voucher ulang tahun	Dilaksanakan setiap bulan
6	SK Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya pencegahan COVID-19	Penyesuaian sistem kerja ASN pada masa Pandemi COVID-19



Kegiatan		Keterangan
7	Surat Edaran tentang Tata Kerja dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru	Penyesuaian sistem kerja ASN pada masa Pandemi COVID-19
D	Terlaksananya Pelayanan Pensiun	
1	Pensiun	Pengurusan Pensiun kepada 48 pegawai

b. Rencana dan laporan keuangan Bagian Kepegawaian (2 dokumen)

Kegiatan		Keterangan
A	<i>Action Plan</i> dan <i>Cash Plan</i>	Rencana kegiatan dan rencana penarikan dana Bagian Kepegawaian
B	Laporan Realisasi Triwulanan	Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Output per triwulan

## 2

### Indeks Kepuasan Dukungan Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi

Target  
**3,30**

Realisasi

Capaian

Indikator kinerja ke 2 dari sasaran “Meningkatnya kualitas dukungan kepegawaian dan organisasi” adalah “**Indeks Kepuasan Dukungan Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi**”. Indeks diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dengan target indeks kepuasan Dukungan Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 3,30 dari hasil survei yang dilaksanakan mendapatkan indeks XXXX maka untuk indikator kinerja ke 2 pencapaiannya adalah XXXXXXXX

Untuk mendukung pencapaian target kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi, di tahun 2020 telah dilaksanakan 468 kegiatan yang diwujudkan melalui 2 program kegiatan utama yaitu:

- a. Kegiatan dukungan Administrasi Keanggotaan Dewan sebanyak (52 Kegiatan) dengan penjelasan sebagai berikut:
  1. Pengurusan PAW Anggota DPR RI dan Pergantian Periode Keanggotaan Dewan  
Proses pengurusan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI dilakukan mulai dari memproses Usulan Pemberhentian dan Penggantian Anggota Antar waktu dari Parpol sampai dengan terbitnya Keputusan Presiden mengenai peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota antar Waktu Pengganti. Kegiatan proses PAW diakhiri dengan proses pelantikan dan pengurusan hak-hak administrative anggota DPR RI baik yang digantikan maupun penggantinya.

Pada Tahun 2020 dilakukan proses pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota sebanyak 14 (empat belas) Anggota DPR RI, Kegiatan dimaksud meningkat jika dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 9 (sembilan) Anggota DPR RI. Proses pengurusan pemberhentian dan penggantian antar waktu Anggota DPR RI tahun 2020 meningkat mengingat tahun 2020 adalah tahun politik dimana pemerintah melaksanakan pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak.

**Gambar XXX.** Persiapan Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI periode 2019 – 2024



Sumber: Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi, 2020

## 2. Pengurusan Pensiun Anggota DPR dan Pensiun Janda/Duda

Pada tahun 2020, telah melakukan proses pengurusan pensiun sebanyak 7 (tujuh) orang Anggota DPR RI yang diberhentikan Antarwaktu. Disamping melakukan proses pengurusan pensiun pemberhentian Antarwaktu, Bagian Keanggotaan Kesekretariatan Fraksi juga melakukan proses pengurusan pensiun janda/duda sebanyak 4 (empat) orang.

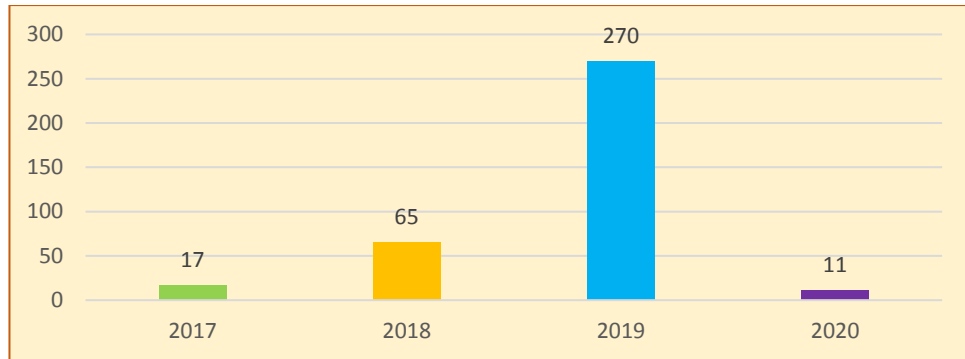
Proses pengurusan pensiun anggota DPR RI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Menelusuri dan mengumpulkan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi untuk pengusulan penetapan pensiun anggota DPR RI dengan Keputusan Presiden.
- Melakukan penghitungan jumlah pokok pensiun.
- Mengumpulkan dan mengolah data Anggota DPR RI untuk persyaratan pengurusan Pensiun dan Tunjangan Hari Tua.
- Mengusulkan penetapan Pensiun dengan Keppres melalui Surat Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR RI.
- Berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Keuangan untuk pembuatan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Penggajian).
- Menyampaikan Keppres Penetapan Pensiun dan SKPP kepada Anggota yang bersangkutan.





**Gambar XXX.** Data Persandingan Jumlah Pensiun Anggota DPR RI dan Pensiunan Janda/ Duda



Sumber: Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi, 2020

### 3. Pengurusan jenazah

Pengurusan administrasi Anggota DPR RI yang meninggal dunia pada tahun 2020 sejumlah 3 (tiga) orang Anggota DPR RI. Proses pengurusan jenazah mulai dari persemayaman, pemakaman sampai dengan pemberian hak-hak administrasi dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait dan Pihak Keluarga Anggota yang bersangkutan.

### 4. Pengelolaan Data dan Informasi Keanggotaan DPR RI Periode 2014 – 2019 dalam Sistem Informasi Anggota (SIGOTA).

Tim ini melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan informasi keanggotaan Dewan periode 2019 – 2024 dalam Sistem Informasi Anggota (SIGOTA) dengan melakukan up date data setiap terjadi perubahan data Anggota DPR RI baik yang dilakukan secara manual maupun menggunakan Sistem Aplikasi SIGOTA. Tim Pengolah data juga selalu memantau perkembangan pada Sistem Informasi Anggota (SIGOTA) tersebut sehingga data yang dimanfaatkan akurat dan terkini. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 1243/SEKJEN/2020 tentang Pembentukan Perubahan Atas Keputusan Sekjen DPR RI No. 324/SEKJEN/2020 tentang Pembentukan Tim Pengolahan Data dan Informasi Keanggotaan DPR RI periode 2019-2024 pada Sistem Informasi Anggota Dewan (SIGOTA) Tahun Anggaran 2020.

Kecepatan, keakuratan dan ketepatan data dan informasi Keanggotaan Dewan sangat dibutuhkan oleh unit kerja terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengingat Sistem Informasi Anggota (SIGOTA) sudah terhubung langsung dengan Sistem Informasi yang ada pada unit-unit kerja lain dimaksud.

### b. Kegiatan dukungan kesekretariatan Fraksi sebanyak (416 Kegiatan)

#### 1. Penyelenggaraan Rapat-rapat Fraksi DPR RI (9 Fraksi)

Pada tahun 2020 telah memberikan dukungan teknis dan administrasi

penyelenggaraan Rapat Pimpinan Fraksi, Rapat Pleno, Rapat Koordinasi Bidang, dan Rapat Poksi yang secara keseluruhan sejumlah 190 (seratus sembilan) kali rapat.

2. Penerimaan Tamu/Delegasi Ke Fraksi

Pada tahun 2020 telah memberikan dukungan teknis dan administrasi penyelenggaraan penerimaan tamu/delegasi masyarakat ke fraksi yang secara keseluruhan sejumlah 220 kali penerimaan tamu/delegasi masyarakat.

3. Seminar/FGD Fraksi

Pelaksana Kegiatan Seminar/FGD Fraksi telah terealisasi sesuai permintaan fraksi sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali, sedang Tahun 2019 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dan semuanya telah terselenggara dengan baik sesuai dengan permintaan Fraksi-fraksi DPR RI.

Kegiatan Seminar/FGD Fraksi bertujuan untuk memperluas referensi substantif materi pada Fraksi-fraksi DPR RI dalam pelaksanaan Fungsi, Tugas dan wewenang DPR RI dengan mengundang pakar dan narasumber yang berkompeten pada bidangnya.

**Untuk melaksanakan seminar dimaksud dibentuk Panitia seminar/*focus Group Discussion (FGD)*/kegiatan sejenis.** Panitia Seminar ditetapkan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Setjen DPR RI. Panitia Seminar/FGD bertugas menyelenggarakan Seminar/FGD berdasarkan permintaan dari Pimpinan Fraksi DPR RI.

Gambar XXX. Salah satu Pelaksanaan FGD di Fraksi



Sumber: Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi, 2020

### 3

## Hasil Penilaian Evaluasi Kelembagaan

Target  
**4**

Realisasi  
**4**

Capaian  
**100 %**

Indikator kinerja Ke 3 Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah “**Hasil penilaian Evaluasi Kelembagaan berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018**”. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah merupakan landasan bagi instansi pemerintah untuk memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Nilai evaluasi kelembagaan merupakan hasil perhitungan atas aspek evaluasi struktur organisasi (yang terdiri dari subdimensi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi) dan evaluasi proses organisasi (yang terdiri dari subdimensi keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen resiko, dan teknologi informasi).

**Tabel XXXXX. Hasil Evaluasi Kelembagaan**

DIMENSI	SKOR	Deviasi dari max
Kompleksitas	12,95	48%
Formalisasi	9,821	21%
Sentralisasi	9,943	20%
<b>TOTAL</b>	<b>32,71</b>	<b>35%</b>
Alignment	10	0%
Governance and Compliance	10	0%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	6,25	38%
Manajemen Risiko	7,5	25%
Teknologi Organisasi IT	8,5	15%
<b>TOTAL</b>	<b>42,25</b>	<b>16%</b>
<b>Peringkat Komposit</b>	<b>74,96103896</b>	



**Tabel XXXX. Deskripsi Struktur Bobot Penilaian**

<b>KETERANGAN</b>	<b>P-4</b>	
	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.	
	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	<b>Efektif</b>
	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	<b>Tinggi</b>
Kekurangan	<b>Kelemahan kecil</b>	

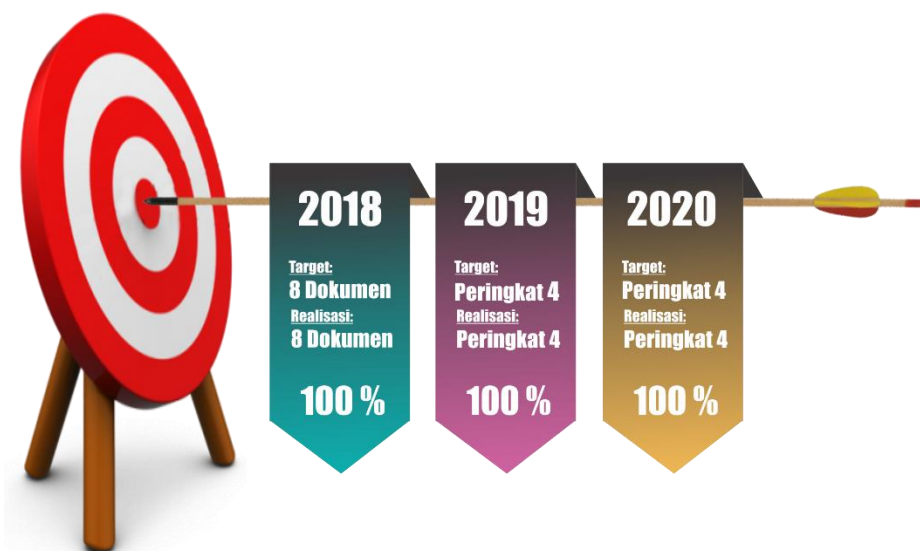
Dari table XXXX menunjukkan bahwa struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal. Dengan target nilai evaluasi kelembagaan 4 dan dari hasil penghitungan mendapatkan peringkat komposit 4, maka untuk indikator kinerja ke 3 telah mencapai target yang telah ditetapkan (capaian 100%).

Berdasarkan tabel hasil evaluasi tersebut maka struktur organisasi dipandang sudah cukup memadai dalam mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI. Desain organisasi telah ditata sedemikian rupa sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi walaupun masih terdapat kebutuhan-kebutuhan tertentu yang bersifat spesifik yang menjadi pertimbangan perbaikan organisasi. Aspek yang paling lemah baik pada level lembaga maupun level satu tingkat di bawah lembaga adalah terkait dengan perbaikan dan peningkatan proses.

Selama periode 3 (tiga) tahun terakhir, target indikator kinerja biro Kepegawaian dan Organisasi telah berhasil dicapai sebagaimana dijelaskan dalam gambar XXXX berikut.



Gambar XXXX. Capaian Indikator periode 2018 – 2020



Berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, evaluasi yang dilaksanakan mencakup dua dimensi pokok organisasi yaitu Dimensi Struktur dan Dimensi Proses Organisasi. Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian target Biro Kepegawaian dan Organisasi Tahun 2020 terkait penilaian evaluasi kelembagaan, Bagian Organisasi dan Tatalaksana di tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap dua dimensi pokok organisasi Setjen DPR RI, yang terdiri atas:

#### A. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) subdimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Sesuai dengan pemahaman ketiga subdimensi di atas, Bagian Organisasi dan Tata Laksana telah melakukan pengelolaan tugas dan fungsi organisasi yang dilakukan melalui penataan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penataan struktur organisasi yang dilakukan sejalan dengan penataan jabatan-jabatan pelaksana pada masing-masing unit kerja dan pembentukan jabatan fungsional baru. Penataan jabatan yang dilakukan dengan menetapkan jumlah kebutuhan jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja berdasarkan hasil analisis beban kerja. Selain itu, dilaksanakan analisis jabatan yang mengatur dengan jelas prosedur kerja secara praktis, tahap pelaksanaan tugas yang berurutan secara logis dan terkait dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja. Kejelasan aturan dalam pelaksanaan tugas ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien serta mendorong tercapainya visi dan misi organisasi. Kegiatan yang sudah dilakukan Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada tahun 2020 terkait dimensi struktur organisasi, adalah sebagai berikut:

Gambar XXXX. Kegiatan Bagian Organisasi dan Tatalaksana terkait sub dimensi struktur tahun 2020





## B. Dimensi Proses Organisasi

Aspek proses yang terjadi di organisasi juga merupakan aspek yang sangat penting dan sering menjadi perhatian di dalam analisis organisasi. Proses organisasi merupakan gambaran berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk menciptakan dan memelihara rantai nilai (*value chain*) dalam rangka mencapai tujuan utama secara dinamis. Dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) subdimensi, yakni: keselarasan, tata kelola, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko dan teknologi informasi. Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Organisasi dan Tatalaksana di tahun 2020 yang bertujuan untuk perbaikan terhadap dimensi proses organisasi dijelaskan dalam Gambar XXXX berikut:

**Gambar XXXX.** Kegiatan Bagian Organisasi dan Tatalaksana terkait sub dimensi Proses tahun 2020







Keberhasilan pencapaian kinerja terkait hasil penilaian evaluasi kelembagaan di Bagian Organisasi dan Tatalaksana dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- a. Perencanaan kerja yang baik di awal tahun serta diikuti dengan kegiatan evaluasi secara periodik dalam memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Adanya arahan yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan;
- c. Proaktif dan antisipatif terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- d. Koordinasi yang intensif baik secara internal maupun dengan instansi terkait; dan
- e. Evaluasi berkala dan penentuan prioritas terkait ketersediaan anggaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Organisasi dan Tatalaksana menghadapi beberapa tantangan dan kendala yang mempengaruhi kinerja. Meski tidak semua kendala tersebut dapat dikendalikan, namun dengan kreatifitas berfikir, kerjasama tim serta komitmen dalam menyelesaikan tugas, Bagian Organisasi dan Tatalaksana dapat mengoptimalkan kinerjanya. Adapun tantangan serta rekomendasi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dapat dilihat pada table XXXX berikut.

Tabel XXXX. Tantangan yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaiannya

TANTANGAN	REKOMENDASI
<p>Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Periode 2020 – 2024 Setjen DPR RI serta rencana perubahan Struktur Setjen DPR RI, perlu dilakukan kembali penyesuaian kembali Peta Proses Bisnis dan SOP terhadap Renstra dan Struktur baru tersebut</p>	<p>Perlu melibatkan pihak eksternal organisasi dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau pihak penyedia jasa dalam memberikan pandangan yang objektif.</p>
<p>Adanya pekerjaan-pekerjaan yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi dan Tatalaksana, namun harus dikerjakan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana sehingga menambah beban kerja, yang menyebabkan tertundanya penyelesaian tugas pokok unit kerja</p>	<p>Perlu adanya penataan kembali tugas pokok dan fungsi unit kerja, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien.</p>

## 4

## Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kesehatan

Target

3,30

Realisasi

3,374

Capaian

102,24 %

Indikator kinerja ke 4 Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah “**Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kesehatan**” yang diperoleh melalui survei kepada Anggota DPR RI. Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI dengan berpedoman terhadap PermenPAN & RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dengan target indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kesehatan 3,30 dan dari hasil survei yang dilaksanakan mendapatkan indeks 3,374, maka untuk indikator kinerja ke 4 pencapaiannya telah melebihi target yang ditetapkan (capaian 102,24 %).

Untuk mendukung pencapaian target kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi, di tahun 2020 telah dilaksanakan Sebelas (11) layanan yang terdiri atas: Spesialis anak, spesialis jantung, spesialis mata, spesialis internis, spesialis jiwa, spesialis neurologi, spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis THT, ahli gizi, patologi dan apoteker.


Untuk meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan yang diberikan, pada tahun 2020 Bagian Pelayanan Kesehatan akan melakukan akreditasi bagi layanan kesehatan untuk meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian dan konsistensi dalam bekerja memberikan keunggulan kompetitif, menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas dan meningkatkan keilmuan pada staf.

Adapun capaian kinerja Bagian Yankes dapat dilihat Perbandingan Data Kunjungan Pasien Poli Dokter Spesialis dijelaskan dalam Tabel XXX berikut.

NO	POLIKLINIK	2019	2020	KETERANGAN
a.	Spesialis Kesehatan Jiwa	28	26	Menurun
b.	Spesialis Kesehatan Anak	399	108	Menurun
c.	Spesialis Kesehatan Jantung	365	138	Menurun
d.	Spesialis Kesehatan mata	787	374	Menurun
e.	Spesialis Kesehatan Neurologi	442	206	Menurun
f.	Spesialis Penyakit Dalam	449	258	Menurun
g.	Spesialis Kebidanan dan Kandungan	788	223	Menurun
h.	Spesialis THT	735	299	Menurun
i.	Spesialis Patologi Klinik	615	600	Menurun

Tabel XXX. Data Kunjungan Pasien Poli Dokter Spesialis

Sedangkan Perbandingan Data Kunjungan Pasien dijelaskan dalam **Tabel XXX**. Berikut.



NO	JENIS LAYANAN	Jumlah Kunjungan Pasien		KETERANGAN
		2019	2020	
1.	Pelayanan Kesehatan Dokter Umum	19.637	14.292	Menurun
2.	Pelayanan Kesehatan Gigi	4.788	1.728	Menurun
3.	Layanan Fisioterapi	2.945	1.342	Menurun
4.	Layanan Laboratorium	3.688	3.380	Menurun
5.	Layanan Gizi	368	58	Menurun
6.	Layanan Farmasi	25.678	16.613	Menurun
7.	Layanan Ruang Tindakan	320	240	Menurun

**Tabel XXX.** Data Kunjungan Pasien


Dari ke dua tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi global Covid-19 dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), layanan di Bagian Pelayanan Kesehatan di batasi menyebabkan penurunan jumlah pasien yang berobat. Selain itu dalam rangka penanggulangan Covid-19 mulai bulan Agustus sampai Desember 2020 dilaksanakan skrining untuk semua pegawai Setjen DPR RI dan tracing pada pegawai yang kontak erat dengan teman di Unit kerja yang hasil Swab PCR nya positif.

Sehubungan pelaksanaan kegiatan skrining dan tracing tersebut, maka Bagian Pelayanan Kesehatan telah bekerjasama dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga analis kesehatan yang belum mengikuti pelatihan untuk pengambilan sample usap melalui hidung dan mulut. Pelaksanaan skrining telah berjalan lancar, dan telah dilaksanakan skrining setiap bulan kepada seluruh Pegawai Setjen DPR RI dengan target 6.000 pegawai setiap skrining.

Pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan dengan optimal karena didukung dengan alat-alat kesehatan yang secara rutin dilakukan pemeliharaan serta kalibrasi, sesuai jadwal. Untuk lebih mengoptimalkan pemeriksaan laboratorium maka dilakukan penggantian alat Hematology Analyzer, dan pengadaan alat Autoclave untuk mensterilkan alat kebidanan. Untuk mengecek suhu badan setiap pegawai atau tamu yang masuk ke lingkungan Setjen DPR dilakukan pengadaan alat thermal gun yang pengoperasiannya bekerja sama dengan Bagian Pamdal.

Setiap Tenaga Kesehatan yang bertugas di Bagian Yankes secara rutin mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya dengan mengikuti seminar dan workshop kesehatan. Selain itu, keikutsertaan dalam seminar maupun workshop kesehatan bagi Tenaga Kesehatan adalah salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan perpanjangan Surat Ijin Praktek.

Selama pandemi covid-19 pelaksanaannya dengan melalui webinar dan zoom meeting. Terkait dengan Layanan gizi, selama pandemi Covid-19 terjadi penurunan jumlah pasien yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya penurunan jumlah pasien yang konsultasi dan tidak adanya kunjungan rutin Ahli Gizi/ Nutrisisionist ke



Tempat Penitipan Anak (TPA) di karenakan tutup. Untuk mencegah penularan dan edukasi masalah kebersihan dibagikan field shield dan sepatu boot kepada pemilik warung di pujasera.

Setiap triwulan Ahli Gizi secara rutin melakukan pengawasan mulai dari sebelum makanan diolah hingga makanan tersebut disajikan di kantin Pujasera dan kantin Risanti agar memenuhi standar kesehatan. Pelayanan kesehatan di ruang tindakan Bagian Yankes pada tahun 2020 juga mengalami penurunan di banding tahun 2019 yang dikarenakan PSBB dan adanya pembatasan kehadiran pegawai 25 % hadir di kantor.

Untuk layanan kesehatan promotive, dalam rangka peningkatan derajat kesehatan karyawan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, khususnya kegiatan penyuluhan kesehatan, selama tahun 2020 telah dilakukan 5 (lima) kali Webinar (seminar online series):

- a. Seminar kesehatan “Aman dan sehat di lingkungan perkantoran pada masa Pandemi Covid-19” yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan narasumber Dr.dr. Dewi Sumaryani Soemarmo, MS,SpOk
- b. Seminar Kesehatan “Kelenturan dan control pernapasan untuk mengatasi nyeri dan kelelahan” yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan narasumber Drs. Slamet Sumarno, M.Fis, Ftr. Didik Suwarko, S.ST
- c. Seminar kesehatan “Gangguan penghidu (penciuman) pada Covid-19” dan “Uji pemeriksaan antigen, dan antibody pada infeksi Covid-19” pada tanggal 3 November 2020 dengan narasumber dr. Olivia Desiana Santoso P.,SP.THT,M.Sc dan dr. Elly Santosa, Sp.PK
- d. Seminar Kesehatan “Kesehatan Mata Selama Pandemi” serta “Asupan Nutrisi untuk menunjang kesehatan mata” pada tanggal 19 November 2020 dengan narasumber dr. Margrette Pallyama F.Sp.M,M.Sc dan Nurfaida Pratiwiningrum, S.Gz.
- e. Seminar Kesehatan “Pencegahan dan Management Gangguan Psikosomatik pada Pandemi Covid-19” dan “Atasi stress meraih bagia dengan hati Iklhlas” pada tanggal 8 Desember 2020 dengan narasumber dr. Edward Faisal,Sp.PD dan dr. Martono Herianto, Sp.KJ.

Dalam melaksanakan kegiatan Bagian Pelayanan Kesehatan menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- a. Kurangnya Tenaga Kesehatan  
Jumlah pengguna layanan di Bagian Yankes semakin meningkat, akan tetapi tidak diikuti dengan bertambahnya jumlah tenaga kesehatan yang bertugas. Khususnya jumlah Dokter Umum, perawat umum dan perawat gigi
- b. Keterbatasan luas ruang layanan kesehatan Dengan semakin bertambahnya jenis layanan, alat kesehatan, maka diperlukan penambahan luas ruangan.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan:

- a. Untuk mengatasi kekurangan tenaga Dokter Umum, perawat umum dan perawat gigi dengan berkirim surat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi dan berkirim surat ke Kemenkes dengan nomor surat: KP.04/366/Sekjen DPR RI/XII/2020





tanggal 30 Desember 2020 perihal permintaan penambahan dokter dan perawat PNS.

- b. Keterbatasan luas ruangan diatasi dengan mengoptimalkan ruang yang ada dengan menata dan mendisain ulang ruangan dan mengajukan melalui Biro Pengelolaan BMN.

# 5

## Persentase Penyerapan Anggaran Biro Kepegawaian dan Organisasi

Target

90

Realisasi

96,88

Capaian

107,64%

Indikator kinerja ke 5 dari sasaran “meningkatnya kualitas dukungan kepegawaian dan organisasi” adalah “Persentase Penyerapan Anggaran Biro Kepegawaian dan Organisasi”. Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana angka penyerapan tersebut merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh unit-unit kerja di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Ditahun 2020 pagu anggaran yang dialokasikan untuk Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah Rp32.036.161.000,00. Selama tahun 2020 anggaran yang digunakan sebesar Rp31.038.115.347,00 atau sama dengan 96,88 % dari total Pagu Anggaran. Maka untuk indikator ke 5 pencapaiannya telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 107,64 %.

Selama periode 5 (lima) tahun terakhir, angka penyerapan anggaran Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana dijelaskan dalam gambar XXXX berikut.



Tabel XXX. Capaian realisasi anggaran Biro Periode 2016 s.d. 2020

### III.3. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tahun 2020 dialokasikan sebesar **Rp32.036.161.000,00** dengan realisasi anggaran **Rp31.038.115.347,00** atau **96,88%**. Akuntabilitas keuangan Biro Kepegawaian dan Organisasi berdasarkan sasaran dan indikator kinerja selama tahun 2020, dapat digambarkan dalam Tabel XXX.

**Tabel XXX**  
Akuntabilitas Keuangan Biro Kepegawaian dan Organisasi berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2020

Satker/Program/Kegiatan			Anggaran		
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas dukungan kepegawaian dan organsiasi	Hasil penerapan merit sistem dalam manajemen ASN	3	3.909.931.000,00	3.893.544.250,00	99,58%
	Indeks Kepuasan dukungan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi	3,30	5.001.895.000,00	4.394.340.400,00	87,85%
	Hasil penilaian evaluasi Kelembagaan	4	1.685.302.000,00	1.674.393.500,00	99,35%
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kesehatan	3,30	18.518.494.000,00	18.447.183.547,00	99,61%
	Presentase penyerapan anggaran Biro Kepegawaian dan Organisasi	90%	2.920.539.000,00	2.628.653.650,00	90,01%
<b>TOTAL</b>			<b>32.036.161.000,00</b>	<b>31.038.115.347,00</b>	<b>96,88 %</b>

Penjelasan akuntabilitas keuangan pada Tabel XXX dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Anggaran Bagian Kepegawaian

Capaian indikator kinerja pertama “Hasil Penerapan Merit Sistem dalam Manahemen ASN”, realisasinya 3 (100%) dengan pagu anggaran sebesar **Rp 3.909.931.000,-** dimana realisasi anggarannya sebesar **Rp3.893.544.250,00** atau **sebesar 99,58%** dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian telah mencapai 100 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020.

2. Capaian Realisasi Anggaran Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi

Capaian indikator kinerja kedua “Indeks kepuasan dukungan administrasi



keanggotaan dan kesekretariatan fraksi”, **realisasinya XXXX (XXXX%)** dengan pagu anggaran sebesar **Rp5.001.895.000,00** dimana realisasi anggarannya sebesar **Rp4.394.340.400,00** atau sebesar **87,85%** dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi telah mencapai 100 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020.

3. Capaian Realisasi Anggaran Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Capaian indikator kinerja ketiga “hasil penilaian evaluasi kelembagaan” berdasarkan Permenpan RB nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, realisasinya 4 (100%) dengan pagu anggaran sebesar **Rp1.685.302.000,00** dimana realisasi anggarannya sebesar **Rp1.674.393.500,00** atau sebesar 99,35% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Ortala telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020.

4. Capaian Realisasi Anggaran Bagian Pelayanan Kesehatan

Capaian indikator kinerja ke empat “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kesehatan”, realisasinya 3,374 (102,24 %) dengan pagu anggaran sebesar **Rp18.518.494.000,00** dimana realisasi anggarannya sebesar **Rp18.447.183.547,00** atau sebesar **99,61%** dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pelayanan Kesehatan telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020.

5. Capaian realisasi Anggaran kegiatan di Biro Kepegawaian dan Organisasi

Capaian indikator kinerja kelima “persentase penyerapan anggaran Biro Kepegawaian dan Organisasi”, realisasinya 96,88 (107,64 %) dengan pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian target kinerja sebesar **Rp2.920.539.650,00** dimana realisasi anggarannya sebesar **Rp2.628.653.650,00** atau sebesar **90,01%** dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Biro Kepegawaian dan Organisasi telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020.



## IV

## PENUTUP

### IV.1. KESIMPULAN

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7/PER-SEKJEN/2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta amanat reformasi birokrasi khususnya area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Biro kepegawaian dan Organisasi telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas rencana kinerja dan penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Biro Kepegawaian dan Organisasi terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan sebagai wujud komitmen untuk selalu meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja Biro kepegawaian dan Organisasi Tahun 2020 menjabarkan capaian atas Indikator Kinerja yang mencerminkan capaian kinerja sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Sebagaimana penjelasan di atas, capaian kinerja Biro kepegawaian dan Organisasi telah berhasil memenuhi keseluruhan target yang telah ditetapkan. Adapun penyerapan/realisasi anggaran sebesar RP.31.038.115.347,00 atau 96,88% dari pagu yang ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan anggaran sebesar 96,88% dari pagu anggaran yang diberikan, Biro Kepegawaian dan Organisasi dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang disusun.

### IV.2. REKOMENDASI

Secara umum sasaran program/kegiatan Biro kepegawaian dan Organisasi sudah tercapai dengan baik, meskipun terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk selanjutnya menjadi rekomendasi untuk peningkatan kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi di masa mendatang, antara lain:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan KASN terkait pelaksanaan penilaian mandiri penerapan sistem merit di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (SIPINTER) KASN;
2. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam penyampaian informasi terkait layanan yang diberikan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi kepada penerima manfaat;
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan keterlibatan unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI dalam penetapan Struktur dan jabatan serta standar, prosedur dan mekanisme kerja dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang ada, seperti



- antara lain kebijakan nasional penyederhanaan birokrasi, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pandemi global Covid – 19;
4. Mengusulkan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan Pandemi global Covid – 19 khususnya untuk pelaksanaan screening, tracing, pembelian APD dan Vitamin serta obat-obatan. Selain itu juga mengusulkan permintaan tambahan tenaga kesehatan dan penataan kembali ruang pelayanan kesehatan;
  5. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran dengan lebih optimal dan menetapkan skala prioritas pelaksanaan kegiatan sebagai *exit strategy* dalam menghadapi risiko pelaksanaan pemotongan/ efisiensi anggaran di Setjen DPR RI/ secara nasional di masa yang akan datang.



## LAMPIRAN

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Kepegawaian dan Organisasi	1. Hasil penerapan merit sistem dalam manajemen ASN	3
		2. Indeks kepuasan dukungan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi	3,30
		3. Hasil penilaian evaluasi kelembagaan	4
		4. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kesehatan	3,30
		5. Presentase penyerapan anggaran Biro Kepegawaian dan Organisasi	90 %

Program	Anggaran
Kegiatan : Pengelolaan SDM dan Organisasi	Rp29.047.901.000,-

Plt. Deputi Bidang Administrasi,



Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.  
NIP. 19610623 198803 1 001

Jakarta, 02 Januari 2020  
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi,



Rahmad Budiaji, S.IP., M.Si  
NIP. 19700801 199603 1 001